

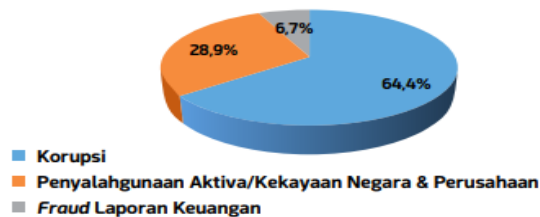
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerasan pembukuan di Indonesia masih dianggap sebagai budaya bawaan dan sulit untuk dihapuskan. Sependapat dengan Rizky & Aida Fitri (2017), Penipuan melibatkan tindakan sengaja yang merugikan orang lain untuk tujuan komersial. Dalam konteks akuntansi, pemerasan dapat membingkai penyimpangan dari prosedur akuntansi yang dilakukan oleh suatu organisasi, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan penyajian laporan anggaran. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kejadian pembukuan dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pemerasan aset dalam rangka perampokan atau dugaan sumber daya, penyelewengan atau penyelewengan dalam rangka kegiatan yang menutupi kondisi anggaran sebenarnya, dan *Debasement* berupa pemanfaatan dampak ilegal untuk pengambilan perorangan.

Menyesuaikan dengan munculnya tinjauan ACFE Indonesia 2019, jenis kejadian yang kerap terjadi di Indonesia ialah penurunan nilai dengan angka mencapai 64,4%. Secara perluasan, ekstraksi dalam kerangka sumber daya diberikan manfaat sebesar 28,9 %, dan penjelasan terkait uang yang salah diberikan 6,7 %. (<https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia>).



Gambar 1.1
Fraud yang terjadi di Indonesia

Pemerasan dalam keuangan dapat menyebabkan data yang akan datang menjadi salah jika kesalahan yang dibuat tidak dapat mempengaruhi penjelasan keuangan. Kecurangan akuntansi menjadikan informasi dalam laporan keuangan objektif, yang memungkinkan informasi tersebut disalahgunakan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menimbulkan kerugian negara (Mardianto & Tiono, 2019).

Fenomena pembukuan yang terjadi di Indonesia ialah penguasaan laporan anggaran Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Jawa Tengah. Permasalahan yang ditemukan antara lain Penatausahaan Konsumsi Bantuan Sosial Bagi Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Tahun 2020 yang belum sepenuhnya memuaskan. Terlebih lagi, penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional (BOP) belum dilaksanakan sesuai dengan Dinas Pengendalian Masalah Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

Fenomena kecenderungan tidak hanya itu saja, beberapa minggu sebelumnya kecurangan terjadi di dalam institusi Pendidikan. Tepatnya 21 Agustus 2022 di Universitas Lampung, di mana KPK menetapkan rektor Universitas Lampung yaitu Karomani sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi senilai kurang lebih Rp 5 miliar terkait

penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri (sumber: kompas. Hal ini menambah deretan kecurangan yang terjadi dalam sebuah perguruan tinggi. Artinya ketika masalah-masalah yang terjadi ini adanya krisis moralitas dan etika ilmiah di kalangan dosen menjadibenh subur praktik korupsi di perguruan tinggi.

Fenomena yang sedang hangat dibangkalan ialah penangkapan Bupati Bangkalan dan 5 Kepala dinas terkait kasus korupsi. Kepala dinas yang dimaksud ialah Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy. Latif selaku Bupati Bangkalan disangka Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, lima lainnya disangka melanggar Pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Senada dengan Arsad *et al.*, (2018), banyaknya Kejadian pembukuan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah saat ini dapat menimbulkan kerugian negara

dan implikasinya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai komitmen untuk mewujudkannya secara sukses dan efektif. Salah satu tugas pemerintah ialah menjamin dana pemerintah diawasi dan dipertanggungjawabkan secara sah

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi ialah penerapan dan pengaturan *Standard Operating Procedure* (SOP). Peran *Standard Operating Procedure* (SOP) ialah untuk memastikan sistem kerja yang efisien, sistematis dan bertanggung jawab. *Standard Operating Procedure* (SOP) akurat dan serasi dnegan pekerjaan yang dilakukan (Sulam *et al.*, 2019). Inti dari SOP bagian pemerintahan ialah untuk mewujudkan komitmen terhadap apa yang dilakukan satuan kerja untuk mencapai administrasi yang hebat (Handayani, 2021)

Menurut Chasanah (2018), faktor lain yang mempengaruhi kecurangan ialah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menggabungkan komponen manusia, komponen program yang menjalankan kerangka kerja untuk melakukan berbagai kapasitas, khususnya formulir pembukuan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, program, dan landasan inovasi data seperti komputer dan perangkat keras lainnya. Kesalahan atau kegagalan yang disengaja atau tidak disengaja dapat terjadi pada komponen ini. Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Nengzih (2020) dan Chasanah dan Yulinda (2018) menyatakan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Menurut Pratama (2022), faktor ketiga yang mempengaruhi penipuan akuntansi ialah kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Aturan pembukuan memuat aturan-aturan yang harus digunakan dalam menampilkan laporan

moneter. Aturan pembukuan ini berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh IAI. Kepatuhan terhadap kontrol pembukuan merupakan hal mendasar untuk menjaga perincian anggaran yang dibutuhkan oleh mitra.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) disebutkan bahwa kepatuhan terhadap aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin banyak karyawan mengetahui dan mengikuti aturan akuntansi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Berdasarkan pendekatan teori keagenan, terdapat perbedaan antara prinsipal (*stakeholder*) dan agen (manajemen). Disparitas yang muncul ialah mitra membutuhkan laporan anggaran perusahaan yang ditampilkan dengan manfaat yang besar, sedangkan administrasi membutuhkan imbalan yang besar. Karena perbedaan-perbedaan ini, dapat timbul benturan kepentingan yang membuka kemungkinan adanya kesalahan atau kondisi administrasi (Renata & Yudowati, 2020).

Sementara itu, Peraturan Daerah Bangkalan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang masuk dalam daftar pencapaian Wajar Tanpa Kasus Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2018-2023 dari BPK. Pencapaian ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri yang harus disyukuri oleh masyarakat Kab. Bangkalan. Selain itu, kinerja pemerintah Kab. Bangkalan dapat diapresiasi. Untuk itu pengendalian internal yang dilakukan pemerintah Kab. Bangkalan sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, mengingat fenomena kecurangan akuntansi dalam melaporkan laporan keuangan sangat besar.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan perbedaannya dengan temuan sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) dan Chasanah dan Yulinda (2018). Penelitian ini menjadi penting karena peneliti ingin mengetahuinya dan menambah variabel *Standard Operating Procedure* dengan objek kabupaten bangkalan sebagai peraih 5 WTB berturut-turut, sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Standard Operating Procedure* (SOP), Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Ketaatan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibangun oleh peneliti sebagai berikut:

1. Apakah *Standard Operating Procedure* (SOP) berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah *Standard Operating Procedure* (SOP), Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Standard Operating Procedure* (SOP) pada pemerintahan terhadap kecurangan akuntansi.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintahan terhadap kecurangan akuntansi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Standard Operating Procedure* (SOP), Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini akan dipaparkan yakni sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penulisan masa lalu mengenai dampak SOP, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.
2. Bagi para pembaca, semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan mengenai *Standard Operating Procedure* SOP, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai wacana dan memperluas wawasan bagi kegiatan ilmu Akuntansi dalam rangka mengendalikan dan meminimalisir kecurangan dan fraud di lingkungan pemerintahan.
4. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.